

Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan

Amalia Nur Azizah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
email: amaliaazizah15@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang sampai saat ini menjadi menjadi pembahasan dunia. Kemiskinan juga masuk dalam poin utama pembangunan berkelanjutan (SDG's), oleh karena itu penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama dan diperlukan penanganan secara komprehensif, yang melibatkan banyak pihak dan banyak sektor. Salah satu upaya yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan ialah program keluarga harapan. Program ini telah dicanangkan sejak tahun 2007 dan hingga saat ini masih berjalan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan, faktor penghambat dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber penelitian terdahulu, yang berasal dari atikel, berita, maupun situs Kementerian Sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH sudah memberikan manfaat bagi penerimanya, namun belum maksimal dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam penerepannya PKH masih memiliki kekurangan yakni penerima bantuan PKH ini terbatas dimana masih banyak masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai peserta PKH akan tetapi tidak terdaftar sebagai peserta dikarenakan telah memenuhi kuota yang telah disiapkan.

Kata kunci : Program Keluarga Harapan (PKH); Pengentasan Kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional problem that until now has become a world discussion. Poverty is also included in the main points of sustainable development (SDG's), therefore poverty reduction is a shared responsibility and comprehensive handling is needed, involving many parties and many sectors. One of the efforts made by the Indonesian government in poverty alleviation is the family hope program. This program has been launched since 2007 and is still running. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Family Hope Program, inhibiting factors and what efforts are made to overcome these inhibiting factors. Method This research uses qualitative methods. The data used in this study are secondary data obtained from previous research sources, which come from aticles, news, and the Ministry of Social Affairs website. The results of this study show that PKH has provided benefits for its recipients, but has not been maximized in reducing poverty in Indonesia. In its implementation, PKH still has shortcomings, namely the recipients of PKH assistance are limited, where there are still many people who meet the criteria as PKH participants but are not registered as participants because they have met the quota that has been prepared

Key Words: Family Hope Program (PKH); Poverty Alleviation

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila ditandai dengan pendapatan rendah, pendidikan yang rendah, produktivitas kerja rendah, kesehatan dan gizi rendah, serta kesejahteraan hidup yang rendah. Kemiskinan juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal yang pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan non formal (Supriatna,2010). Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Angka ini menurun 0,17 poin dibandingkan September 2021 yang sebesar 9,71%. Angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 menunjukkan perbaikan alias yang terendah semenjak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.



Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang per September 2022. Jumlah ini naik tipis dibandingkan pada akhir Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan secara persentasenya, jumlah masyarakat miskin per September sebesar 9,57 persen, naik 0,03 persen dibandingkan Maret 9,54 persen.

Pulau Jawa sendiri, jumlah penduduk miskinnya mencapai 13,94 juta orang merujuk pada data BPS September 2022. Sebaran terbanyak ada di Jawa Timur sebanyak 4,23 Juta penduduk miskin dan Jawa Barat sebanyak 4,05 Juta jiwa. Dengan rata rata presentase penduduk desa lebih banyak masyarakat miskin daripada penduduk di kota.

Wilayah desa memiliki tingkat kemiskinan tertinggi disebabkan karena pendapatan per kapita yang masih rendah atau mendekati garis kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, serta indeks pembangunan manusia juga rendah. Rendahnya pendidikan dan IPM akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin rendah pula kualitas tenaga kerja. Jika kualitas tenaga kerja rendah maka produktifitas juga rendah. Oleh karena itu akan mengakibatkan rata-rata penghasilan penduduk juga rendah, sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan dapat dikatakan penduduk tersebut miskin.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi masalah yang disebabkan oleh kemiskinan salah satunya adalah dengan membuat kebijakan terkait pemberdayaan keluarga miskin, salah satu kebijakannya yaitu membuat Program keluarga Harapan (PKH) yang mulai dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No. 31/KEP/MENKO/KESRA.IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, No. 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007).

Tujuan diberlakukannya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MGDs) yang sekarang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Ada lima komponen SDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita di bawah lima tahun (Dirjen Linjamsos, 2017).

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana PKH dapat menjadi program yang membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana penerapan program keluarga harapan dalam upaya pemerintah menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

METODE

Artikel ini ditulis dengan pendekatan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber penelitian terdahulu, dengan merujuk pada hasil pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen elektronik sebagai referensi yang mendukung penulisan artikel. Sumber data didapatkan melalui studi kepustakaan (*literature review*) yang ambil dari artikel-artikel dan tulisan ilmiah lainnya yang membahas tentang topik seputar program keluarga harapan dan kemiskinan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dari pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dengan penyaluran bantuan melalui HIMBARA. Berdasarkan pada hasil pengamatan bahwa pendampingan dilakukan rutin pada tiap bulannya oleh pendamping PKH yang merupakan bagian dari sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. [1]

Tabel. 1

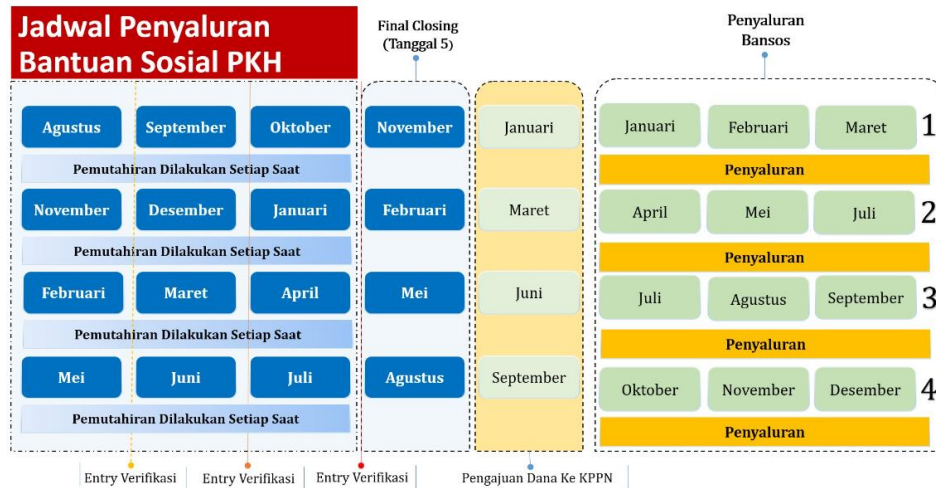
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

	Pelayanan yang diberikan	Kriteria
1.	Pendidikan	Anak yang berusia 7-15 tahun dan terdaftar pada satuan pendidikan
2.	Kesehatan	Anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan nifas
3.	Kesejahteraan Sosial	Lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat

Sumber: PERMENSOS No 1 Tahun 2018

Pendampingan dilakukan setelah dinyatakan sebagai peserta atau KPM PKH. Pendampingan pencairan dana dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan KPM PKH tentang tahapan penyaluran dana. Dalam setahun dana disalurkan dengan empat tahapan. tahap pertama, dana tersalur pada bulan Januari, tahap kedua dana tersalur bulan April, tahap ketiga dana tersalur bulan Juli, dan tahap empat pada bulan Oktober. Berikut tahapan penyaluran dana.

Gambar. 1



2. Faktor penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan program keluarga harapan di Indonesia, yaitu: Pertama kecemburuan sosial yang terjadi antara Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang tidak menerima bantuan PKH dengan KSM yang telah menjadi anggota PKH yang disebabkan oleh data dari Kementerian Sosial tidak sesuai dengan yang ada di lapangan padahal mereka juga memenuhi persyaratan dengan KSM yang telah menjadi anggota peserta PKH [2]. Kedua, belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap PKH disebabkan oleh pembinaan terhadap KPM masih terkendala waktu dan kesibukan dari penerima bantuan untuk bekerja serta terkendala oleh adanya pandemi Covid-19. 3. Banyaknya warga miskin yang belum menjadi peserta PKH. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi yang berupa pemahaman akan program belum maksimal bagi penerima bantuan PKH, karena ada saja masyarakat yang menerima bantuan belum mengerti meskipun telah dijelaskan berulang kali. [3]. Hal ini sangat mempengaruhi jalannya pengimplementasian PKH. Adanya ketiga faktor penghambat tersebut membuat tidak berjalannya implementasi Program Keluarga Harapan dengan maksimal.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dari pelaksanaan program keluarga harapan antara lain, yang pertama dari pihak kecamatan

dapat memberikan pengertian kepada masyarakat bahwasanya pendataan dilakukan oleh pihak pusat melalui koordinasi dengan BPS dengan data yang diperoleh dari (Pendataan Program Perlindungan Sosial) PPLS. [4] Selain itu juga dari pihak kecamatan dapat lebih dulu melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi tentang Permasalahan data yang masih tidak sesuai agar ditindaklanjuti ke pihak pusat.

Kedua, para pendamping sosial kecamatan melakukan monitoring secara bertahap ke lapangan agar dapat melihat perkembangan dari peserta penerima bantuan dan memastikan para KPM melaksanakan kewajibannya sebagai peserta PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, apabila KSM sangat ingin menjadi anggota PKH mereka dapat membuat surat pengaduan yang kemudian diserahkan kepada pendamping kecamatan. Kemudian pendamping menyerahkan data waiting list kepada Operator untuk selanjutnya dikirim ke UPPKH pusat sebagai sumber data (Pendataan Program Perlindungan Sosial) PPLS. [5]

4. Temuan Penelitian

Dari beberapa penelitian terdahulu selama kurun waktu 6 tahun terakhir, mulai tahun 2017-2022. Peneliti mendapati beberapa hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan program Keluarga Harapan di beberapa daerah yang berbeda. Didapati bahwa mayoritas pelaksanaan PKH masih belum optimal. Perlu adanya peningkatan dan evaluasi baik dari Pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa penelitian yang menjadi rujukan peneliti diantara lain, yang pertama (Ayuni P & Nugroho A, 2022), Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu jumlah penerima PKH masih sedikit baru 2,7% dari angka kemiskinan namun tingkat kepuasan masyarakat 93%. Disisi lain masih adanya penyalahgunaan wewenang sehingga 7% yang ada tersebut harus segera ditangani. Adanya fasilitas konsultasi publik yang dinamakan Contact Center yang dibuat oleh Kemensos. Sikap integritas pegawainya yang belum kuat mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Saran yang diberikan yaitu memberikan pelatihan ke KPM (Kartu Penerima Manfaat), perbaikan dalam merekrut SDM (Sumber Daya Manusia), dan Pendamping PKH menjadi fasilitator tentang informasi pelatihan dan kursus sertifikasi kepada KPM.

Kedua (Saragi S. dkk, 2021) Analisis Program Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. Dari penelitiannya mengungkapkan bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kebenaran kondisi peserta hingga pengumpulan ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan pelatihan.

Ketiga (Desi Pratiwi, 2020), Efektivitas Program Keluarga harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur). Menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitiannya Program Keluarga Harapan belum mensejahterakan Masyarakat serta belum tepat sasaran, hal ini terjadi karena proses penerimaan batuan yang relatif lama sehingga masyarakat telah mengalami perkembangan pada sisi ekonomi.

Keempat (Rining dkk, 2019) Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. Hasil penelitian tersebut mengatakan, bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Namun dalam komunikasinya masih diperlukan peningkatan yang lebih komunikatif dari pihak Pendamping PKH, dan Peserta PKH. Dinas Sosial melibatkan Pendamping PKH dalam rapat koordinasi, seminar dan matrikasi sebagai bekal untuk meningkatkan profesional dalam implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dinas Sosial memberikan tugas pada Pendamping PKH untuk membantu Peserta PKH dalam memberikan penyuluhan terkait syarat dan ketentuan wajib yang harus dipenuhi Peserta PKH.

(Kelima, Prayitna dkk, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi PKH telah mampu menambah tingkat kesejahteraan pesertanya, meningkatkan akses dan kehadiran di sekolah dan layanan kesehatan, memberikan kesadaran adanya diskriminasi gender, meningkatkan partisipasi terhadap program, namun PKH belum sepenuhnya menyentuh tingkat kontrol peserta terhadap lembaga pendidikan dan kesehatan ketika bersinggungan dengan kebutuhannya berdasarkan pilihan-pilihan aspirasi personalnya.

(Keenam, Oktavia Tirani, 2017) berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Poso dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini berdasarkan teori Implementasi dari George Edward III. Adapun hasil dari

penelitian ini belum optimal, berdasarkan dari empat indikator menurut Edward III aspek sumber daya dan aspek birokrasi sudah berjalan dengan baik akan tetapi dari aspek komunikasi dan disposisi (sikap pelaksana) belum berjalan dengan baik. Masyarakat masih banyak yang belum paham tentang penggunaan dana yang diberikan sehingga masyarakat sebagai peserta harus diawasi dan harus sering ditingkatkan kefasilitas kesehatan maupun pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program keluarga Harapan (PKH) dalam upayanya menuntaskan kemiskinan di Indonesia masih belum maksimal. Program-program yang digagas oleh Pemerintah guna mengurangi kemiskinan di Indonesia sangatlah beragam.

PKH sendiri dapat menambah kesejahteraan bagi para penerimanya, namun sejauh pelaksanaan PKH ini diterapkan masih belum mampu untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dengan sangat drastis. Dalam praktiknya PKH masih terdapat kekurangan yakni, data penerima bantuan program tersebut belum diperhatikan dengan baik yang menjadikan kurang merata dan mendetailnya sasaran yang dituju untuk penerima bantuan keluarga harapan.

Dalam hal ini penulis memberikan saran agar program keluarga harapan di tinjau dengan baik mulai dari sasaran yang dituju untuk menerima bantuan PKH serta meninjau proses pelaksanaannya. Kerjasama antar lini pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat, harus terjaga dengan baik dan komunikatif. Agar Ketika terjadi permasalahan terhadap program keluarga harapan baik dilapangan maupun diluar lapangan dapat segera teratasi dengan baik. Dan harus adanya evaluasi setiap bulan maupun tahunan terhadap program keluarga harapan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal :

- [1] Sutino C, Rizqi A and S. S Wijaya, "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas," *J. Ilmu Administrasi Negara. UPN*Jatim, vol. 3, no. 6, 2021.
- [2] Prayitna, Nurhaeni and Dermatoto "Evaluating Program Keluarga Harapan (Pkh) In Improving Women Empowerment On Education And Health," *J. Spirit Publik.*, vol 13 no.1 April, 2018.
- [3] Novi A and Hendra S, "Analysis of the Family Hope Program: Analisis Program Keluarga Harapan," *Indonesian Journal of Public Policy Review.*, vol 20no.1 April, 2022.
- [4] Pratiwi D, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan

- Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Nubab Kab. Lampung Timur)," *Skripsi*, vol 13 no.1 April, 2020.
- [5] D Dian and P Indah, "Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan (Studi Pada Komponen Kesejahteraan Sosial)," *J. Publika.*, vol 11 no.3 2023.
- [6] Siswati S and Maria U, "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak," *J. Manajemen SDM, Administrasi dan Pelayanan Publik*, vol VIII no.1 2021.
- [7] Syahputra & Risma, "Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan" , *J. Prosiding KS:Riset&PKM*, vol 4 no.1, 2017.
- [8] Tirani O, "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN POSO" e *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 6, 1-9, 2017.
- [9] Ayuni and A. A, "Evaluasi Kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) di Indonesia," *Journal of Public Policy and Applied Administration Vol 4 No 2 2022*, vol. Vol 4 No 2, pp. 39-53, 2022.
- [10] R. W. d. A. Talkah, "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH di Kecamatan PanggungREJO Kabupaten Blitar," *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, vol. Vol 9 No 2, 2020.
- [11] C. S and E. Rining, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu," *Journal of Public Sector Innovation*, vol. Vol 3 No 2, pp. 68-74, 2019.
- [12] D. T, C. J and Lisbeth, "Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado," *Jurnal Holistik* , vol. Vol 13 No.2, 2020.
- [13] A. Sofianto, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah," *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, vol. Vol 10 No.1, pp. 14-31, 2020.
- [14] S. R and d. Syahrudin, "Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru," *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, vol. Volume 2 No.1, 2022.
- [15] H. L. Nurul Najidah, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowoasri Kecamatan Tembalang Kota Surabaya," *Journal of Public Policy*, 2019.
- [16] D. U. Rr. Diana Febrianti, "PEMANFAATAN BANTUAN PKH BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DI DESA SIDOREJO KABUPATEN SIDOARJO," 2019.
- [17] N. M and I. Nurhadji N, "Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. Vol 7 No 2, pp. 108-116, 2019.

Sumber dari Web:

- [1] Badan Pusat Statistik, "Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi," 2022. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>.

- [2] Kementerian Sosial, “Program Keluarga Harapan (PKH),” 2018. [Online]. Available: <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.
- [3] JDIH BPK “PERMENSOS No 1 Tahun 2018” 2018. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018>.
- [4] Badan Pusat Statistik, “Penduduk Miskin Turun 2022. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>.
- [5] Dirjen Lijamsos, “Penyaluran Bantuan PKH”, 2017. [Online]. Available: <https://kemensos.go.id/direktorat-jenderal-perlindungan-dan-jaminan-sosial>.